ANALISA DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 TENTANG CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA BANK BCA, BRI, DAN MANDIRI

Oleh

Deni Ramdani¹, Raja Yulianita Sarazwati², Dinda Indira Subagio³, Dwi Tiara Kurnilasari⁴

¹Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

^{2,3,4}Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

Email: ¹denir1798@gmail.com, ²rajayulianita@polibatam.ac.id,

³dinda@polibatam.ac.id, ⁴dwitiera@polibatam.ac.id

Article History:

Received: 01-12-2024

Revised: 27-12-2024

Accepted: 04-01-2025

Keywords:

PSAK 71, CKPN, Bank

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak atas penerapan PSAK 71 pada Bank BCA, BRI, dan Bank Mandiri,. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan mulai berlaku efektif pada tahun 2020. PSAK 71 ini mengadopsi IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data dan informasi dari laporan keuangan BCA, BRI, dan Bank Mandiri di idx.co.id. Laporan Keuangan yang diambil mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan kenaikan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang disebabkan perubahan basis dari *incurred loss* menjadi *expected credit loss*. Atas hal tersebut, perbankan dan OJK harus melakukan mitigasi risiko akibat adanya penerapan PSAK 71 yang berdampak pada Laporan Keuangan para emiten perbankan

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sektor perbankan sangat berdampak pada perekonomian suatu negara.

Dalam pelaksanaan proses bisnisnya, terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh Bank yang salah satunya adalah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sesuai dengan PBI No. 14/15/PBI/2012, Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Penghitungan CKPN dilakukan dengan melakukan kombinasi data historis dan melihat kondisi aset saat ini.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menyatakan bahwa PSAK 55 akan digantikan PSAK 71. Aturan ini diberlakukan dan efektif per Januari 2020. PSAK 71 ini

mengadopsi IFRS 9 yang menggantikan IAS 36. Penerapan PSAK 71 berdampak signifikan pada sektor perbankan, khususnya dalam perhitungan CKPN. Pada PSAK 55, metode perhitungan dengan basis *incurred loss* yang sifatnya *backward looking* dimana CKPN akan terbentuk ketika ada bukti bahwa debitur mengalami penurunan nilai (*impairment*) dalam pembayaran kredit. *Backward looking* ini mengakibatkan terciptanya mitigasi risiko ketika bukti yang ada berupa data-data historis.

Dalam penerapannya, PSAK 71 menggunakan perhitungan CKPN dengan basis baru yaitu *expected credit loss* yang bersifat *forward looking*. Dengan metode perhitungan ini, mitigasi risiko atas *impairment* telah dilakukan sejak pengakuan awal kredit. Informasi atas peristiwa masa lalu dan kondisi saat ini merupakan aspek penting yang harus dimasukkan dalam pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 71. Dengan memperhatikan informasi atas peristiwa masa lalu, perusahaan dapat melakukan identifikasi atas 3 *stage* (tingkatan) nilai kredit, yaitu yang bersifat *performing* (lancar), *underperforming* (kurang lancar), maupun *non-performing* (macet).

Adanya PSAK 71 dalam sektor perbankan sangat bermanfaat untuk menyajikan informasi relevan khususnya dalam penilaian terhadap jumlah *impairment* dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Suroso (2017) mengatakan bahwa terjadinya peningkatan CKPN atas penerapan PSAK 71 sekitar 30-50%. Hal ini berdampak pada penurunan performa perbankan dalam memenuhi kecukupan penyediaan modal minimum.

LANDASAN TEORI

PSAK 71

Akuntansi untuk instrumen keuangan merupakan isu yang cukup kontroversial di Dewan Standar Akuntansi Internasional yaitu IASB (*International Accounting Standard Board*), terlebih lagi saat terjadi krisis di tahun 2008. Dorongan untuk merubah standar sebelumnya yaitu IAS 39 (*Financial Instrument: Recognition and Measurement*) timbul karena dalam kondisi krisis laporan keuangan justru IAS 39 menunjukkan kelemahan diantaranya:

- a) Kesulitan untuk mengaplikasikan nilai wajar di pasar yang tidak likuid,
- b) Keterlambatan untuk mengakui kerugian terkait pinjaman yang diberikan dan instrumen keuangan lainnya oleh lembaga-lembaga keuangan,
- c) Kompleksitas standar akuntansi untuk instrumen keuangan, termasuk pendekatan untuk mengakui penurunan nilai.

Kelemahan yang dimiliki oleh IAS 39 mengakibatkan IFRS 9 (*Financial Instruments*) memperkenalkan :

- a) Klasifikasi dan pengukuran baru atas aset keuangan.
- b) Model Pengakuan Kredit Ekspektasian (*Forward Looking Expected Credit Loss Model*).
- c) Memperbaiki akuntansi untuk lindung nilai.

Beberapa perbedaan yang dimiliki kedua sistem tersebut disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbedaan PSAK 71 dan PSAK 55

	PSAK 71	PSAK 55
Penentuan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan	Berdasarkan modal bisnis dengan SPPI	Berdasarkan intensi manajemen
Klasifikasi Aset Keuangan	<i>Fair value through profit, FVOCI, Amortized Cost</i>	<i>Held To Maturity, Fair Value Through Profit, Loan and Receivable, Available for sale</i>
Reklasifikasi Aset Keuangan	Apabila terdapat perubahan model	Berlaku untuk reklasifikasi kategori HTM ke AFS melebihi batas material
<i>Tainting Rules</i>	Dihapuskan	Untuk kondisi tertentu
<i>Hedge Accounting</i>	Persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana Berhubungan langsung dengan manajemen risiko penilaian efektifitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko	Persyaratan dan dokumentasi lebih rinci Tidak ada hubungan langsung dengan manajemen risiko penilaian efektivitas 80-125%

Sumber : Motoviani (2020)

Sistem perbankan di Indonesia sendiri mengadopsi IFRS 9 melalui PSAK 71 (Instrumen Keuangan) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK 71 ini akan menggantikan PSAK 55 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran).

Penurunan Nilai

Selama masa krisis pada tahun 2008, kelemahan yang ada pada sektor perbankan saat itu adalah keterlambatan untuk mengakui kerugian kredit terkait dengan pinjaman yang diberikan ataupun instrumen keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan IAS 39 atau PSAK 55 menggunakan metode *incurred loss* sementara PSAK 71 memperkenalkan model "*forward looking expected loss*" atau metode Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE). Metode KKE dapat diterapkan untuk:

- Aset keuangan pada surat utang yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan FVTOCI, termasuk juga pinjaman yang diberikan dan piutang usaha.
- Komitmen pinjaman dan kontrak garansi yang tidak diukur FVTPL.
- Aset kontrak yang terkait PSAK 72 (pendapatan dari kontrak dengan pelanggan)
- Piutang sewa (PSAK 73)

PSAK 71 secara umum memiliki 3 *stages* yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko

rendah hingga tinggi. Klasifikasi 3 *stages* tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan pendekatan *Credit Risk Standard* ATMR, melalui SE OJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 untuk sementara rumus perhitungan CKPN dengan model PSAK 71 adalah sebagai berikut :

$$\text{ECL} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}$$

$$\text{EAD} = \text{Outstanding} + \text{Usage Given Default} + \text{sisa plafon}$$

Tabel 2. *Stages* (tingkatan) Model PSAK 71

Perubahan Kualitas Kredit Sejak Pengakuan Awal		
Level 1	Level 2	Level 3
<i>Performing</i>	<i>Under Performing</i>	<i>Non-Performing</i>
Pengakuan Awal	Aset dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan	Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit
Metode Kerugian Kredit Ekspektasian		
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (ECL <i>12-months</i>)	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya/sampai jatuh tempo (ECL <i>Lifetime</i>)	Kerugian ekspektasian kredit sepanjang umurnya/sampai jatuh tempo (ECL <i>Lifetime</i>)
Pengakuan Pendapatan Bunga		
Metode bunga efektif berdasarkan saldo terbawa (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)	Metode bunga efektif berdasarkan saldo terbawa (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)	Metode bunga efektif berdasarkan nilai diamortisasi (setelah dikurangi penyisihan kerugian)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2006), metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Bank BCA, BRI, dan Mandiri yang ada di www.idx.com. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dari tahun 2019 hingga Laporan Keuangan tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dianalisis tiga perusahaan perbankan

yaitu Bank BCA, BRI, dan Mandiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bank Central Asia (BBCA)

Sesuai dengan perhitungan CKPN dengan model PSAK 71 sebagaimana dalam Tabel 3, nilai CKPN yang dimiliki oleh Bank Central Asia (BCA) pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12,04 triliun atau 80,78% yaitu dari Rp. 14,90 triliun menjadi sebesar Rp. 26,94 triliun). Pada tahun 2021, CKPN yang dihasilkan oleh BCA sebesar Rp 32,19 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,25 triliun (19,50% dari tahun sebelumnya).

Tabel 3. Perhitungan CKPN Bank Central Asia

Ket	2019	2020	%	2021	%
	A	B	(B/A)- 100%	C	(C/B)- 100%
CKPN	14.905.5 84	26.945.9 42	80,78 %	32.199.72 7	19,50 %

Dampak dari penerapan PSAK 71 yang dilakukan oleh BCA di tahun 2019 yaitu mencapai sebesar Rp 5,52 triliun. Adapun nilai CKPN yang terjadi pada tahun 2019 dengan implementasi PSAK 71 meningkat sebesar Rp 20,43 triliun. Perhitungan nilai CKPN dengan implementasi PSAK 71 pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai CKPN tahun 2019 atas Implementasi PSAK 71

	2019	
	Kredit	CKPN
31 Desember 2019	586.939.583	14.905.584
Penerapan PSAK 71		5.528.081
31 Desember 2019	586.939.583	20.433.665

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa BCA telah menerapkan PSAK 71 dengan baik dengan menerapkan 3 *stage*. Pada tahun 2020, kredit yang tergolong *stage 1* pada BCA sebesar Rp. 561,73 triliun. Dengan nilai tersebut telah menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 20,13 triliun (3,58% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 2* pada BCA sebesar Rp. 2,65 triliun. Dengan nilai tersebut telah menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 788 miliar (29,71% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 3* pada BCA sebesar Rp. 10,19 triliun. Dengan nilai tersebut telah menghasilkan CKPN sebesar Rp. 6,02 triliun (59,06% dari nilai kreditnya).

Pada tahun 2021, kredit yang tergolong *stage 1* pada BCA sebesar Rp. 605,71 triliun. Dengan nilai tersebut telah menghasilkan nilai CKPN sebesar 23,18 triliun (3,83% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 2* pada BCA sebesar Rp. 2,43 triliun. Dengan nilai tersebut menghasilkan nilai CKPN sebesar 447 miliar (18,37% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 3* pada BCA sebesar 13,85 triliun. Dengan nilai tersebut menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 8,57 triliun (61,84% dari nilai kreditnya).

Tabel 5. Penerapan 3 Stages PSAK 71 oleh BCA

	2020		2021	
	Kredit	CKPN	Kredit	CKPN
<i>Stage 1</i>	561.736.519	20.134.603	605.719.058	23.182.067
<i>Stage 2</i>	2.655.370	788.811	2.435.660	447.358
<i>Stage 3</i>	10.197.719	6.022.528	13.858.587	8.570.302
Total	574.589.608	26.945.942	622.013.305	32.199.727

Berdasarkan Tabel 6, Pendapatan yang dimiliki oleh BCA pada tahun 2019-2021 tidak berbeda jauh. Dimana pada tahun 2019, pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 63,83 triliun. Lalu pada tahun 2020, pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 65,40 triliun. Dan pada tahun 2021, pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 65,62 triliun. Meskipun pendapatan yang diterima 2019-2021 tidak berbeda jauh, hal ini berbanding terbalik dengan laba yang diterima. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp. 36,28 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 dengan pendapatan yang meningkat sebesar Rp. 1,5 triliun, laba sebelum pajak yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp. 2,70 triliun sehingga laba sebelum pajak menjadi Rp. 33,56 triliun (menurun 7,5% dari tahun sebelumnya). Pada tahun 2021 dengan pendapatan sebesar Rp. 65,62 triliun, BCA menghasilkan peningkatan laba hingga Rp. 5,27 triliun sehingga menjadi Rp. 38,84 triliun (meningkat 15,71% dari tahun sebelumnya).

Tabel 6. Laba Sebelum Pajak BCA Tahun 2019 s.d Tahun 2021

	Pendapatan	Beban CKPN	%	Laba Sebelum Pajak
2019	63.837.795	4.591.343	7,2	36.288.998
2020	65.403.161	11.628.076	17,8	33.568.507
2021	65.626.976	9.323.995	14,2	38.841.174

Penerapan analisis PSAK 71 dengan perubahan *incurred loss* menjadi *expected credit loss* membuat Beban CKPN meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 Beban CKPN yang dihasilkan sebesar Rp. 4,59 triliun (dengan pendekatan *incurred loss*), sedangkan pada tahun 2020 Beban CKPN meningkat sebesar Rp. 7,03 triliun sehingga menjadi Rp. 11,62 triliun (meningkat 153% dari tahun sebelumnya). Sedangkan pada tahun 2021, Beban CKPN yang dimiliki BCA turun sebesar Rp. 2,30 triliun sehingga menjadi Rp. 9,32 triliun (menurun 19,32% dari tahun sebelumnya).

2. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)

Pada tahun 2019, CKPN yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 38,36 triliun. Lalu pada tahun 2020, CKPN yang dihasilkan oleh BRI sebesar Rp. 65,61 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 26,80 triliun (69,86% dari tahun

sebelumnya). Pada tahun 2021, CKPN yang dihasilkan BRI sebesar 84,83 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp.19,68 triliun (30,18% dari tahun sebelumnya). Perhitungan CKPN dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan CKPN Bank Rakyat Indonesia

Ket	2019	2020	%	2021	%
	A	B	(B/A)- 100%	C	(C/B)- 100%
CKPN	38.363.640	65.165.002	69,86%	84.833.734	30,18%

Dampak dari penerapan PSAK 71 yang dilakukan oleh BRI di tahun 2019 yaitu mencapai 12,12 triliun, sehingga nilai CKPN yang terjadi pada tahun 2019 dengan implementasi PSAK 71 menjadi sebesar Rp 50,48 triliun. Perhitungan nilai CKPN dengan implementasi PSAK 71 pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Nilai CKPN tahun 2019 BRI atas Implementasi PSAK 71

	2019	
	Kredit	CKPN
31 Desember 2019	877.431.193	38.363.640
Penerapan PSAK 71		12.124.615
31 Desember 2019	877.431.193	50.488.255

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa BRI telah menerapkan PSAK 71 dengan baik dengan menerapkan 3 *stage*. Pada tahun 2020, Kredit yang tergolong *stage 1* pada BRI sebesar Rp. 790,41 triliun dan nilai tersebut telah menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 23,79 Triliun (3,01% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 2* pada BRI sebesar Rp. 83,13 Triliun dan menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 22,7 Triliun (27,35% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 3* pada BRI sebesar Rp. 25,90 Triliun menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 26,94 Triliun (71,91% dari nilai kreditnya).

Di tahun 2021, kredit yang tergolong *stage 1* pada BRI sebesar Rp. 857,47 triliun menghasilkan nilai CKPN sebesar 19,87 triliun (2,32% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 2* pada BRI sebesar Rp. 106,37 triliun dan CKPN yang dihasilkan sebesar 41,47 Triliun (38,99% dari nilai kreditnya). Kredit yang tergolong *stage 3* pada BRI sebesar 30,56 triliun, oleh karena itu nilai CKPN yang dihasilkan sebesar Rp. 23,48 Triliun (76,83% dari nilai kreditnya).

Tabel 9. Penerapan 3 Stages PSAK 71 oleh BRI

	2020		2021	
	Kredit	CKPN	Kredit	CKPN
<i>Stage 1</i>	790.417.318	23.794.662	857.473.265	19.874.035
<i>Stage 2</i>	83.134.034	22.739.624	106.378.838	41.476.057
<i>Stage 3</i>	25.906.855	18.630.716	30.564.420	23.483.642

Total	574.589.608	26.945.942	622.013.305	32.199.727
-------	-------------	------------	-------------	------------

Dari Tabel 10, pendapatan yang dimiliki oleh BRI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2019, pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 121,75 triliun, pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 135,76 triliun, dan di tahun 2021, pendapatan yang dihasilkan menjadi sebesar Rp. 143,52 triliun.

Meskipun pendapatan yang diterima 2019-2021 mengalami peningkatan, hal ini tidak sejalan dengan laba yang diterima dari tahun ke tahun. Dari Tabel 10 diketahui bahwa laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp. 43,36 triliun. Di tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 14 triliun, namun laba sebelum pajak yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp. 13,37 triliun sehingga laba sebelum pajak menjadi Rp. 29,99 triliun (menurun 31,83% dari tahun sebelumnya). Di tahun 2021 dengan pendapatan sebesar Rp. 143,52 triliun, BRI menghasilkan peningkatan laba hingga Rp. 10,92 triliun sehingga menjadi Rp. 40,92 triliun (meningkat 36,44% dari tahun sebelumnya).

Tabel 10. Laba Sebelum Pajak BRI Tahun 2019 s.d Tahun 2021

	Pendapatan	Beban CKPN	%	Laba Sebelum Pajak
2019	121.756.276	21.556.319	7,2	43.364.053
2020	135.764.561	33.024.492	17,8	29.993.406
2021	143.523.329	35.806.312	14,2	40.922.065

Penerapan PSAK 71 dengan perubahan *incurred loss* menjadi *expected credit loss* membuat Beban CKPN meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 dimana Beban CKPN yang dihasilkan sebesar Rp. 21,55 Triliun (dengan pendekatan *incurred loss*), sedangkan pada tahun 2020 Beban CKPN meningkat sebesar Rp. 11,46 triliun sehingga menjadi Rp. 33,02 Triliun (meningkat 53,20% dari tahun sebelumnya). Pada tahun 2021, Beban CKPN yang dimiliki BRI kembali naik sebesar Rp. 2,78 triliun sehingga menjadi Rp. 35,80 triliun (meningkat 8,42% dari tahun sebelumnya).

3. Bank Mandiri (BMRI)

Sesuai dengan perhitungan CKPN dengan model PSAK 71 sebagaimana Tabel 11, nilai CKPN tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 30,96 Triliun atau 110,51% dari sebesar Rp. 28,02 triliun menjadi sebesar Rp. 58,98 triliun. Di tahun 2021 nilai CKPN Mandiri juga telah mengalami kenaikan sebesar 3,77% atau sebesar Rp.2,22 triliun yaitu nilai CKPN nya menjadi sebesar Rp. 61,21 triliun.

Tabel 11. Perhitungan CKPN Bank Mandiri

Ket	2019	2020	%	2021	%
	A	B	(B/A)- 100%	C	(C/B)- 100%
CKPN	28.021.0 42	58.985.9 67	110,15%	61.211.7 06	3,77 %

Dampak dari implementasi PSAK 71 oleh Bank Mandiri di tahun 2019 mengakibatkan kenaikan nilai CKPN sebesar Rp. 22,45 triliun sehingga nilai CKPN menjadi sebesar Rp 50,48 triliun. Rincian perhitungan nilai CKPN dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Nilai CKPN tahun 2019 Mandiri atas Implementasi PSAK 71

	2019	
	Kredit	CKPN
31 Desember 2019	851.236.210	28.021.042
Penerapan PSAK 71		22.459.928
31 Desember 2019	851.236.210	50.480.970

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa Bank Mandiri telah menerapkan 3 *stage* sesuai dengan PSAK 71. Di tahun 2020 nilai kredit pada *stage 1* Bank Mandiri mencapai Rp. 680,53 triliun, dengan begitu nilai CKPN yang dihasilkan oleh Bank Mandiri menjadi sebesar Rp. 11,56 triliun (1,70 % dari nilai kreditnya). Nilai kredit pada *stage 2* mencapai Rp. 80,62 triliun dengan nilai CKPN yang dihasilkan sebesar Rp. 25,21 triliun (31,27% dari nilai kreditnya). Pada *stage* terakhir nilai kredit Bank Mandiri sebesar Rp. 25,75 triliun sehingga menghasilkan nilai CKPN sebesar Rp. 22,21 Triliun (86,25% dari nilai kreditnya).

Pada tahun 2021, kredit yang tergolong *stage 1* pada Bank Mandiri sebesar Rp. 745,16 triliun dengan nilai CKPN sebesar 11,79 Triliun (1,58% dari nilai kreditnya). Pada *stage 2*, kredit Bank Mandiri sebesar Rp. 87,01 triliun dengan nilai CKPN yang dihasilkan yaitu 29,32 Triliun (33,70% dari nilai kreditnya). Kredit Bank Mandiri yang tergolong dalam *stage 3* mencapai 23,74 triliun, oleh karena itu nilai CKPN Bank Mandiri sebesar Rp. 20,09 Triliun (84,61% dari nilai kreditnya)

Tabel 13. Penerapan 3 Stages PSAK 71 oleh Mandiri

	2020		2021	
	Kredit	CKPN	Kredit	CKPN
<i>Stage 1</i>	680.539.146	11.560.490	745.168.168	11.792.422
<i>Stage 2</i>	80.628.622	25.211.487	87.018.909	29.325.283
<i>Stage 3</i>	25.754.821	22.213.990	23.749.727	20.094.001
Total	786.922.589	58.985.967	855.936.804	61.211.706

Berdasarkan Tabel 14, pendapatan Bank Mandiri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 91,52 triliun, Rp. 95,61 triliun, dan Rp. 97,74 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut tidak selalu sejalan dengan laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh Bank Mandiri. Contohnya pada tahun 2020 nilai pendapatan mengalami peningkatan sedangkan nilai laba sebelum pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 10,05 triliun sehingga laba

sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp.28,4 triliun menjadi Rp. 18,39 triliun (menurun 35,34% dari tahun sebelumnya).

Penerapan PSAK 71 dengan perubahan *incurred loss* menjadi *expected credit loss* membuat Beban CKPN meningkat. Hal tersebut terlihat pada Tabel 13, di tahun 2019 CKPN yang dihasilkan sebesar Rp. 11,74 Triliun (dengan pendekatan *incurred loss*), sedangkan pada tahun 2020 Beban CKPN meningkat sebesar Rp. 11,61 triliun sehingga menjadi Rp. 23,35 Triliun (meningkat 98,87% dari tahun sebelumnya). Pada tahun 2021, Beban CKPN yang dimiliki Bank Mandiri menurun sebesar Rp. 2,92 triliun sehingga menjadi Rp. 20,42 triliun (meningkat 12,53% dari tahun sebelumnya).

Tabel 14. Laba Sebelum Pajak Mandiri Tahun 2019 s.d Tahun 2021

	Pendapatan	Beban CKPN	%	Laba Sebelum Pajak
2019	91.525.090	11.742.986	12,8%	28.455.592
2020	95.616.227	23.355.311	24,4%	18.398.928
2021	97.749.086	20.428.351	20,9%	30.551.097

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dampak-dampak yang terjadi pada penerapan PSAK 71 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Beban CKPN

Peningkatan Beban CKPN pada BCA, BRI, dan Bank Mandiri di tahun 2020, terjadi peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata nilai peningkatan Beban CKPN sebesar 101% dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai CKPN dikarenakan penerapan awal atas *expected credit loss* (ECL) yang membuat nilai beban CKPN meningkat sangat drastis. Di tahun 2021, hanya BRI yang mengalami peningkatan atas Beban CKPN sebesar 8,42% dari tahun sebelumnya. Peningkatan CKPN di BRI dikarenakan terdapat peningkatan nilai kredit yang cukup besar yaitu 10% dari tahun sebelumnya. Disisi lain, Bank Mandiri dan BCA mengalami penurunan atas Beban CKPN sebesar 19,81% dan 12,53%.

2. Peningkatan atas Penurunan Nilai Kredit

Peningkatan atas penurunan nilai kredit pada tahun 2020 terjadi pada BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan penurunan nilai dengan rata-rata di tiga bank tersebut sebesar 87,04%, hal ini dikarenakan penerapan atas PSAK 71 Pada tahun 2021, peningkatan atas penurunan nilai kredit pada tiga bank tersebut dengan rata-rata nilai peningkatan sebesar 17,81 %. Pada BRI tahun 2021, mengalami peningkatan atas penurunan nilai yang dihasilkan pada *stage 2* yakni 38,99% dari nilai kredit.

3. Penurunan Laba

Meskipun pendapatan yang diterima BCA, BRI, dan Bank Mandiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut berbanding terbalik dengan laba sebelum pajak yang dihasilkan. Laba sebelum pajak di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan rata-rata nilai penurunan sebesar 24,55%, hal ini dikarenakan

pada tahun 2019, Beban CKPN hanya mengurangi 12,57% atas pendapatan yang diterima. Akan tetapi di pada tahun 2020, Beban CKPN mengurangi 22,17% atas pendapatan yang diterima. Lalu pada tahun 2021, Beban CKPN mengurangi 20,70% atas pendapatan yang diterima.

4. Klasifikasi kredit

Dikarenakan PSAK 71, mengakibatkan klasifikasi kredit pada tiga bank tersebut menjadi dua klasifikasi. Satu berdasar BI sedangkan satunya berdasar PSAK 71. Dimana klasifikasi kredit pada BI kredit dibagi menjadi 5 macam, sedangkan pada PSAK 71 kredit diklasifikasi menjadi 3 *stage*. Hal ini mengakibatkan terdapat dua sistem pengklasifikasian kredit yang dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan kredit dan perbedaan atas penghitungan CKPN pada klasifikasi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahalik (2019). *Panduan Praktis PSAK 71 : Instrumen Keuangan*. Jakarta: AKUNINDO TANTRA SINERGI.
- [2] Arikunto, Suharsini (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3] Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [4] Indramawan, Dendy (2019). *Implementasi PSAK 71 pada Perbankan*. *Bankers Update : Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, 31, 1-5.
- [5] Laporan Keuangan BBKA 2019-2021
- [6] Laporan Keuangan BBRI 2019-2021
- [7] Laporan Keuangan BMRI 2019-2021
- [8] Matoviany, M.A dan Firmansyah, A (2020). *Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK 71*. *Jurnal Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN, Financial and Tax*, 1(1).
- [9] PBI Nomor 14/15/PBI/2012. *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.
- [10] SE OJK Nomor 42/SEOJK.03/2016. *Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar*.
- [11] Suroso (2017). *Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157-165.
- [12] Witjaksono, Armanto (2017). *Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan terkait Kredit*. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1).
- [13] Yunus, Muhammad dkk (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN